

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Perubahan iklim ialah pembicaraan hangat dan masalah yang sangat penting di berbagai negara di dunia. Perkembangan ekonomi selaras dengan eksplorasi batu bara, gas dan minyak sebagai alat utama pembangunan negara, terlebih untuk pembangunan negara berkembang. Secara umum, faktor penyebab perubahan iklim adalah pemanasan global, rusaknya lapisan ozon, penggunaan Klorofluorokarbon yang berlebihan, serta efek gas rumah kaca. Menurut Panel Antarpemerintah tentang perubahan iklim (2007), fakta saintifik memperlihatkan gas rumah kaca memperburuk pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Kegiatan manusia yang sangat berkontribusi dalam menghasilkan emisi karbon adalah kegiatan industri (Mujjani dkk, 2019). Di Indonesia sendiri, berdasarkan informasi dari kerja sama dengan *Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD), Indonesia Penghasilan emisi gas rumah kaca Indonesia adalah sebesar 2,05 gigaton pada tahun 2005. Data tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara kontributor emisi karbon yang terbesar di dunia peringkat ketiga. Negara yang paling besar menyumbang emisi karbon adalah Amerika Serikat sebanyak 5,95 giga ton lalu China sebesar 5,06 giga ton (Majid & Gozali, 2015). Dengan fakta yang ada, industri secara implisit mendapat tuntutan dalam menyampaikan informasi dan data yang berhubungan dengan aktivitas dan strategi serta rencana yang disusun untuk menekan angka emisi gas rumah kaca.

Pada tanggal 21 Maret 1994, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim mulai diberlakukan dan diadakan *Conferences of the Parties* (COP). Fungsi dari COP ialah untuk menjembatani berbagai pihak untuk menyetujui dan mengesahkan berbagai komitmen. Sidang COP yang diadakan oleh UNFCCC yang ke-3 di kota Kyoto, Jepang, menghasilkan protokol Kyoto. Protokol Kyoto beroperasi dengan berkomitmen pada negara industri dan ekonomi dalam transisi untuk membatasi dan menekan angka emisi gas rumah kaca selaras dengan target individu yang sudah disepakati. Konvensi

tersebut meminta negara-negara yang sudah berkomitmen untuk mengadopsi kebijakan dan tindakan mitigasi dan melaporkan berkala (UNFCCC). Indonesia yang berpartisipasi Protokol Kyoto, telah memberlakukan Protokol Kyoto dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan berupaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca di dunia. Kepatuhan Indonesia dalam pengurangan emisi karbon tertera di Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang “Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca” dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang “Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional”. Tertulis di pasal 4 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011, pelaksana bisnis pun berupaya menurunkan emisi karbon (Apriliana E dkk, 2019). Pada COP ke-21 yang diadakan di Paris, Perancis, COP tersebut menghasilkan Kesepakatan Paris sebagai substitusi dari Protokol Kyoto. Tujuan dari Kesepakatan Paris adalah menurunkan suhu panas bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Untuk itu, negara-negara yang berkomitmen wajib menyertakan informasi mengenai jumlah emisi karbondioksida yang hendak dikurangi (ditjenppi.menlhk). Menurut Climate Transparency (2018), Kebijakan secara kawasan di Indonesia masih tidak sesuai dengan intensi Kesepakatan Paris, terutama dalam aspek yang bersangkutan dengan pemakaian energi batu bara, ketepatangunaan energi di sektor industry serta deforestasi. Produksi emisi gas rumah kaca Indonesia diprediksi akan terus bertambah hingga 1,573-1,751 MtCO<sub>2e</sub> pada tahun 2030. Prediksi ini tidak selaras dengan target yang ditetapkan dalam Kesepakatan Paris. Pada bulan Desember tahun 2016, Asia Pulp & Paper (APP) mulai melakukan produksi di pabriknya senilai USD3 milyar yang menjadi salah satu pabrik untuk memproduksi pulp dan tisu terbesar di dunia. (Wetlands Internasional Indonesia, 2017). Hal ini membuat Organisasi Masyarakat Sipil khawatir dan mendesak Asia Pulp & paper untuk berhenti mengeringkan lahan gambut untuk kegiatan produksinya, dan meminta Asia Pulp & Paper untuk merestorasi area yang terdegradasi. Dalam pernyataan organisasi-organisasi terkait lingkungan seperti WWF Indonesia, Hutan Kita Institute, Organisasi Masyarakat Sipil di Sumatra dan Kalimantan menyebutkan bahwa pabrik ini akan menyebabkan resiko besar untuk lingkungan Indonesia dan dunia. Karena kegiatan produksi Asia Pulp & Paper yang memerlukan pasokan kayu berasal dari lahan gambut yang

sudah dikeringkan. Kegiatan ini merupakan penyebab tingginya angka emisi karbon juga rentan terjadinya kebakaran. Organisasi Masyarakat Sipil dan organisasi peduli lingkungan lainnya menyebutkan bahwa Asia Pulp & Paper perlu sadar betapa krusialnya masalah ini dan harus segera menyusun rencana untuk merestorasi kembali area gambut, karena Asia Pulp & Paper mengabaikan bahwa area gambut yang perusahaan keringkan tidak lestari dan harus memberhentikan operasi. Lahan gambut yang dikeringkan untuk membangun pabrik tersebut seluas 6.000-kilometer persegi, setara dengan tujuh kali luas negara Singapura. Jika dikeringkan untuk difungsikan sebagai tanaman industri, gambut akan mempunyai sifat rawan terbakar, dan saat terbakar akan melepaskan karbon dalam jumlah yang besar. Kekhawatiran ini didasarkan juga pada kebakaran hutan serta lahan yang besar di Indonesia yang terjadi pada tahun 2015, di mana Asia Pulp & Paper adalah salah satu perusahaan yang menjadi penyebab utama terjadinya bencana tersebut dan merugikan ekonomi Indonesia senilai USD16 milyar dan 43 juta orang terpapar asap tebal dan mengidap penyakit saluran pernafasan. (Eyesontheforest.co.id, 2016), serta berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Greenpeace International, sektor sawit dan hutan industri seperti pulp dan kertas pada periode 2015-2018 menyebabkan kebakaran seluas 462.000 hektar gambut. Kebakaran selama periode tersebut terhitung menyebabkan 427 juta ton CO<sub>2</sub> terlepas ke udara. Greenpeace International pun merilis perusahaan merek barang konsumsi yang menyumbang emisi gas rumah kaca karena kegiatan operasionalnya memicu krisis iklim. Merk Mondelez, P&G, Nestle dan Unilever adalah empat perusahaan dunia yang bergerak dalam sektor industri barang konsumen menghasilkan 219,5 juta ton CO<sub>2</sub> dan membakar 237.800 hektar lahan gambut untuk kegiatan produksi di Indonesia (Mongabay.co.id, 2019).

Pengungkapan emisi karbon merupakan adalah akuntansi yang tepat untuk perusahaan dapat menyajikan, mengungkapkan dan mengkomunikasikan aktivitas operasional perusahaan terkait emisi karbon. Karena penting untuk perusahaan mengungkapkan informasi tentang emisi karbon untuk mendapat validasi stakeholder, mencegah risiko, terlebih untuk perusahaan yang memproduksi karbon seperti risiko kenaikan biaya operasional, risiko penurunan permintaan, risiko reputasi nama baik, risiko proses hukum, serta ganti rugi (Robert, 2011 dalam

Probosari D & Kawedar W, 2019). Penyajian dan pengungkapan atas informasi emisi karbon dapat menjadi upaya dalam mengurangi emisi karbon pada aktivitas perusahaan. Namun, pengungkapan dan pelaporan atas emisi karbon masih bersifat *voluntary* atau sukarela di Indonesia. Maka dari itu sedikit perusahaan yang menyajikannya.

Choi *et al.*, (2013) mengatakan ada banyak aspek yang menjadi pengaruh untuk mengungkapan emisi karbon. Choi *et al.*, (2013) menyebutkan tipe industri, level emisi karbon, ukuran perusahaan serta mutu dari tata kelola perusahaan dapat mempengaruhinya. Beberapa penelitian meneliti pengaruh dari tipe industri dan ukuran perusahaan pada pengungkapan emisi karbon. Namun hasilnya beragam. Penelitian Hermawan dkk (2018) dengan variabel ukuran perusahaan mengungkapkan bahwa variabel ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Namun, dalam penelitian Kholmi dkk (2020), dengan variabel kinerja lingkungan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas membuktikan variabel tersebut tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada pengungkapan emisi karbon di perusahaan non-jasa yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017.

Menurut Apriliana E dkk (2019), tidak semua perusahaan menyingkapkan informasi atas kegiatannya. Jika tidak menambah nilai yang positif dan bermanfaat untuk perusahaan, maka perusahaan merasa tidak mempunyai urgensi untuk melakukan pengungkapan informasi. Perusahaan yang bergerak dalam bidang yang aktivitasnya berdampak buruk untuk lingkungan cenderung menyampaikan informasi lebih banyak pada laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR), terlebih terkait informasi lingkungan. Perusahaan dengan kategori intensif yang kegiatan perusahaannya berpengaruh buruk untuk lingkungan akan banyak memberitahukan informasi tentang tanggung jawab sosial daripada perusahaan kategori non-intensif (Wang *et al*, 2013). Dilihat dari penelitian Apriliana E dkk (2019), tipe industri punya pengaruh penting terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, penelitian Widhya & Saptiwi (2019) menghasilkan hasil yang bertolak belakang. Penelitiannya mengungkapkan tipe industri mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Kılıç & Kuzey (2019) mengungkapkan tidak ada kaitan antara keberagaman gender pada dewan direksi dengan pengungkapan emisi karbon. Hasil yang sama

juga diungkapkan oleh Herlina & Juliarto (2019), mereka mengungkapkan bahwa tidak ada jaminannya jika keberagaman gender dari dewan direksi akan lebih menanggapi pengungkapan emisi karbon. Namun, hasil dari penelitian dari Hadya & Susanto (2018) menunjukkan bahwa keberagaman gender pada dewan direksi punya pengaruh positif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mempunyai perempuan yang mempunyai jabatan dewan direksi dengan persentase tertentu di dalam perusahaan cukup kapabel melakukan pengungkapan CSR dengan baik. Dilakukannya penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk melihat pengaruh dari Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, dan Keberagaman Gender Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian Kılıç & Kuzey (2019) dan Hapsari & Prasetyo (2020).

## **I.2 Rumusan Masalah**

Bersumber pada fenomena dan Gap Research yang ada, peneliti membangun beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah keberagaman gender dari dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Untuk menganalisa adanya pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan emisi karbon
3. Untuk menganalisa adanya pengaruh keberagaman gender dewan direksi terhadap pengungkapan emisi karbon.

## **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

- a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan membantu bagi perluasan akan ilmu terkait Teori *Stakeholder* serta Teori Legitimasi mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, dan Keberagaman Gender Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk kajian pembuatan kebijakan tentang emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan di Indonesia diukur dari umur perusahaan, tipe industri dan keberagaman gender dari dewan direksi.

2) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan penilaian serta pertimbangan manajemen perusahaan terhadap kebijakan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

3) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan informasi tambahan kepada pemberi modal sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam menanamkan saham di perusahaan.